

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Angraini. 2015. Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau). *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*. 7 (2): 815-825.
- Anwar, A. F., dan Nursini. 2018. Mengungkap Penghidupan Petani Miskin Pedesaan; Sebuah Kajian Sosial Ekonomi. *Jurnal Ecces*. 5 (1): 1-21.
- Arisandi, Fikri. 2021. *OPD di Bulukumba Dirampingkan, 9 Kadis Bakal Kehilangan Jabatan*. URL: <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/10/opd-di-bulukumba-dirampingkan-9-kadis-bakal-kehilangan-jabatan>. Diakses 16 Januari 2022.
- BPS Kabupaten Bulukumba. 2021. *Statistik Kabupaten Bulukumba Dalam Infografis 2021*. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.
- BPS Kabupaten Bulukumba. 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulukumba 2020*. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.
- Cahyadi, Adi. 2003. E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan. *Journal The WINNERS*. 4 (1): 1-12.
- Damanik, M. P., dan Purwaningsih, E. H. 2017. E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 21 (2): 151-164.
- Darjoko, F. J., dan Naharty, E. 2017. Efek Tipe Kecurangan Dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal Atas Tuduhan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. 14 (2): 202 - 221
- Dash, S., and Subhendu, K. P. 2016. *E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges*. *Procedia Computer Science* 85.
- Diskominfo Bulukumba. 2020. *Tingkatkan Pengawasan, Pemkab Bulukumba Terapkan Whistle Blowing System*. URL: <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/tingkatkan-pengawasan-pemkab-bulukumba-terapkan-whistle-blowing-system>. Diakses tanggal 12 April 2021.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faried, A., Kadir, A. G., dan Faried, F. S.. 2015. *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Firdaus, Imam. 2020. *Korupsi di Indonesia Terus Naik, Begini Hasil Survei LSI*. URL: <https://www.kompas.tv/article/128899/korupsi-di->

- [indonesia-terus-naik-begini-hasil-survei-lsi?page=all](#). Diakses tanggal 8 April 2021.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hartono, D. U., dan Mulyanto, E. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*. 6 (1): 9-16.
- Haiyanta. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.
- Husen, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Ilyas, H., Syarif, A., dan Netty. 2012. Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. 14 (2): 47-56.
- Indrajit, et al. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-Spp (Whistleblowing System-Wbs)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kurniawan, L. dan Hesti, P. 2007. *Wajah Buram Pelayanan Publik*. Malang: Yappika.
- Kusnadi, D., dan Ma'ruf, J. 2015. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu). *Jurnal TAM*. Volume 5: 37-44.
- Marbun, B. N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Muchsan, Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muspitta. 2021. *Oknum Pegawai Samsat Bulukumba Diduga Pungli, Begini Modusnya*. URL: <https://www.bonepos.com/2021/03/05/oknum-pegawai-samsat-bulukumba-diduga-pungli-begini-modusnya>. Diakses tanggal 8 April 2021.
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Perubahan Budaya Birokrasi Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 11 (3): 403-422.
- Poerwandari. 2013. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.

Rosdakarya Offset.

- Rokhman, Ali. 2008. Potret Dan Hambatan E-Government Indonesia. *Inovasi Online*. Vol.11/XX/Juli.
- Siadari, Lagat Parroha Patar. 2020. *Korupsi Lahir Dari Penyimpangan Standar Pelayanan Publik*. URL: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--korupsi-lahir-dari-penyimpangan-standar-pelayanan-publik-> Diakses tanggal 1 April 2021.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Somantri, O., dan Hasta, I. D. 2017. Implementasi e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*. 2 (1): 23-29.
- Sonny. 2013. Analisis Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*. 1 (7): 175-184.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT. Gramedia
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama
- Susmanchi, Georgiana. 2012. Internal Audit and Whistle-Blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*. 7 (4): 415-421.
- Tamtomo, Akbar Bhayu. 2020. *Infografik: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia*. URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>. Diakses tanggal 8 April 2021.
- Tuannakotta, Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, M. S., dan Sulaiman. 2019. Analisis Potensi Wilayah dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Bulukumba. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*. 16 November 2019, Makassar, Indonesia. pp.232-236.
- Wardono, Suko. 2019. *Laporan Evaluasi Whistle Blowing System Bulan Maret*. Denpasar: Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- Yunawati, Sri. 2019. Dampak Penerapan Whistleblowing System terhadap InternalFraud Pada PT. Bank Central Asia Periode 2014 –2017. *Jurnal Ilmiah Cano Economos*. 8 (2): 1-6.
- Zarefar, A., dan Arfan, T. 2017. Efektivitas Whistleblowing System Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 10 (2): 25-33.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Bukti Pendukung Kegiatan

### 1.1 Surat Izin Penelitian

Berikut surat izin penelitian yang didapatkan dari beberapa instansi:

Surat Izin Penelitian

(1)

(2)

(3)

(4)

## Keterangan:

Surat izin penelitian: (1) Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba; dan (4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bulukumba.

## 1.2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Berikut surat keterangan telah melakukan penelitian yang didapatkan dari beberapa instansi:

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA</b> <b>INSPEKTORAT DAERAH</b> <small>Jalan Serikaya Nomor 2, Bulukumba 92111 Sulawesi Selatan, Telp/Fax (0413) 81670</small></p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor: 500/1955/116A/XII/21</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Muhammad Nurjalli, S.H.M.H Nip : 19671104 199803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina TK. I / IV b Jabatan : Sekretaris Inspektorat</p> <p>Berdasarkan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 074/890/Kejabatpp/K/2021, Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi, diberikan Surat Keterangan kepada:</p> <p>Nama : Andi Iman Hadari Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 23 - 11- 1999 No. Pokok : E09118321 Program Studi : Ilmu Pemerintahan Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Mahasiswa S1 UNHAS Makassar Alamat : Perumahan Bukit Tamaraung Somba Opu gowa</p> <p>Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI WISSELBLOWING SYSTEM (WBS) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA"</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai bahan sepernyata.</p> <p style="text-align: right;">Bulukumba, 29 Desember 2021 An. Inspektur Daerah Kab. Bulukumba Sekretaris</p> <p style="text-align: center;"><b>MUHAMMAD NURJALLIL, S.H.M.H</b> Pangkat: Pembina TK. I Nip. 19671104 199803 1 005</p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA</b> <b>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b> <small>Jl. Kesatuan Bangsa No. 9 Bulukumba 92111, Telp/Fax (0413) 810085 Email: dkinform@bulukumbakab.go.id http://bulukumbakab.go.id</small></p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor: 161/D54485/ND/21/10/21</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Wahyudin, S.STP, M.Si NIP : 19790227 199810 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina I, K, U, IV b Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba</p> <p>Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 0611/DPMPTSP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Izin Penelitian maka diberikan Surat Keterangan kepada:</p> <p>Nama : Andi Iman Hadari Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 23 November 1999 NIP : 1981111221 Program Studi : Ilmu Pemerintahan Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Mahasiswa S1 UNHAS Makassar Alamat : Perumahan Bukit Tamaraung, Somba Opu, Gowa</p> <p>Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba dalam rangka penusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba"</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai bahan sepernyata.</p> <p style="text-align: right;">Bulukumba, 24 Desember 2021 An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba</p> <p style="text-align: center;"><b>WAHYUDIN, S.STP, M.Si</b> Pangkat: Pembina TK. I NIP: 19790227 199810 1 001</p>
(1)	(2)

## Keterangan:

Surat keterangan telah melakukan penelitian: (1) Inspektorat Kabupaten Bulukumba; (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba;



### 1.3 Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba

#### Tampak Depan



#### Ruangan IRBAN I



## Ruangan IRBAN II



## Ruangan IRBAN III





## Ruangan IRBAN IV



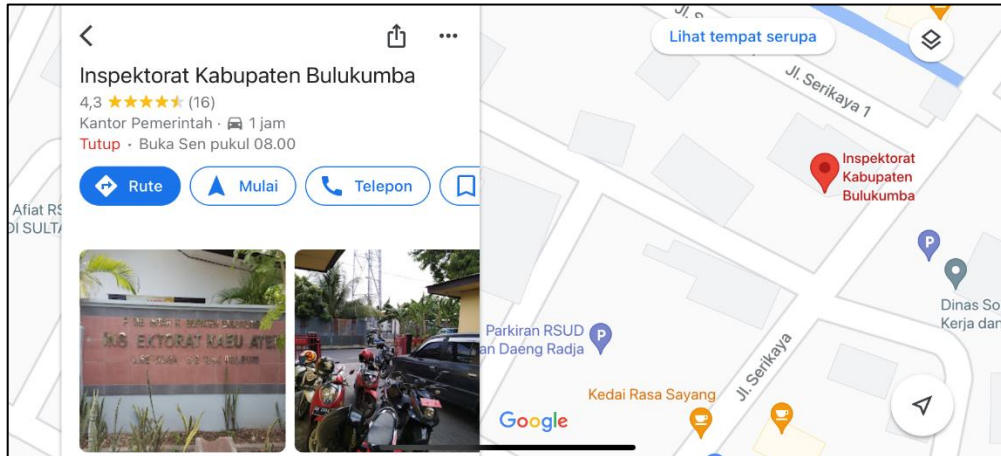
## Ruangan Sub Bagian Program dan Pelaporan Sekaligus Ruang Operator Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)





## 1.4 Lokasi Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba

### Lokasi Kantor Inspektorat Daerah



## 1.5 Dokumentasi Pengumpulan Data

### Pengumpulan Data



Wawancara dengan Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba pada tanggal 9 November 2021.



Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 November 2021.



Wawancara dengan Operator Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Inspektorat Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 November 2021.



Wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 November 2021.



Wawancara dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 2 Desember 2021.



Wawancara dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 3 Desember 2021.



Wawancara dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Desember 2021.



Wawancara dengan Anggota LSM di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 Desember 2021.

---

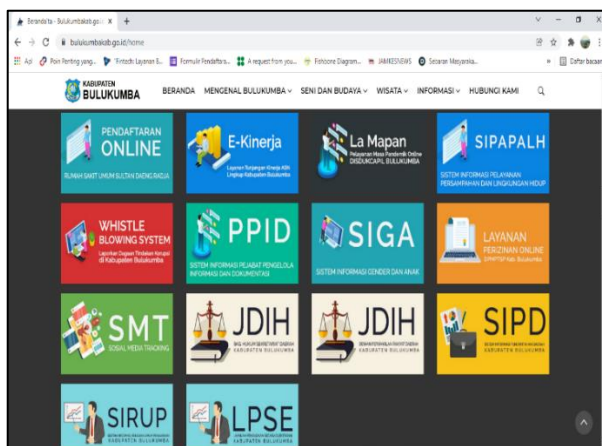


## 1.6 Aplikasi Whistleblowing System (WBS)

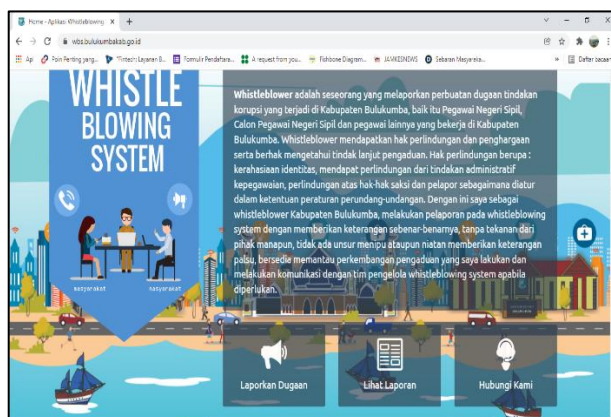
### Whistleblowing System (WBS) Kabupaten Bulukumba



Aplikasi WBS dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu [Bulukumbakab.go.id](http://Bulukumbakab.go.id)

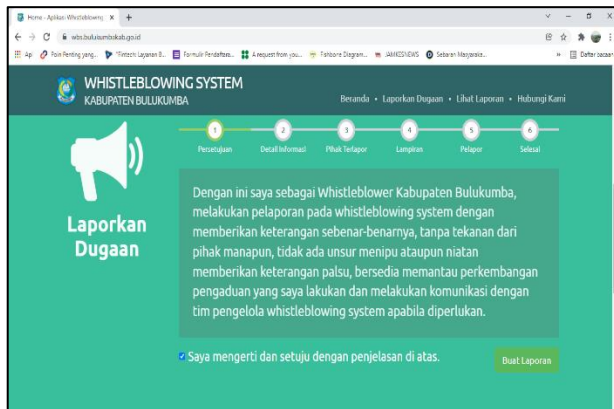


Setelah masuk di *website*, selanjutnya tinggal klik aplikasi WBS.

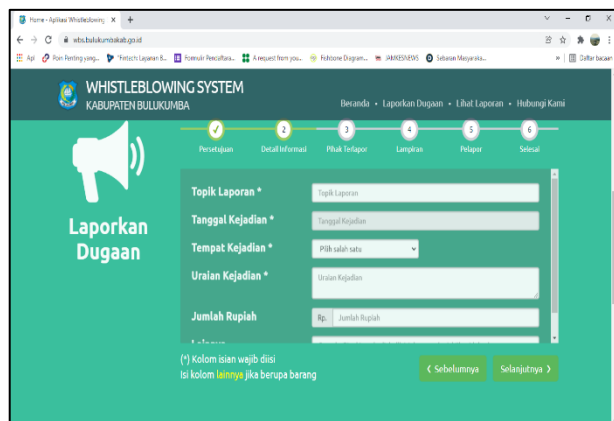


Selanjutnya, pengguna akan disajikan Fitur Home dari aplikasi WBS yang terdiri dari tiga (3), yaitu: (1) Laporkan Dugaan, (2) Lihat Laporan, dan (3) Hubungi Kami

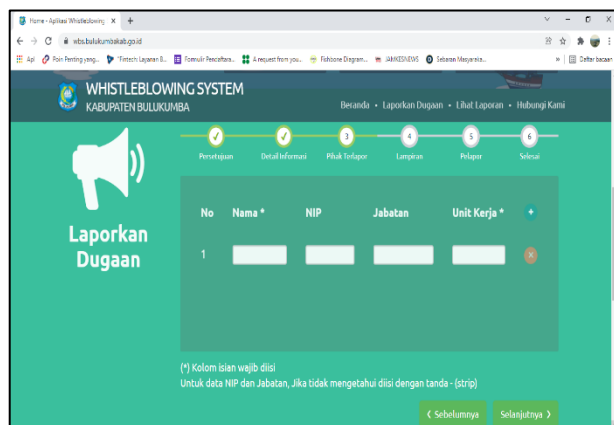




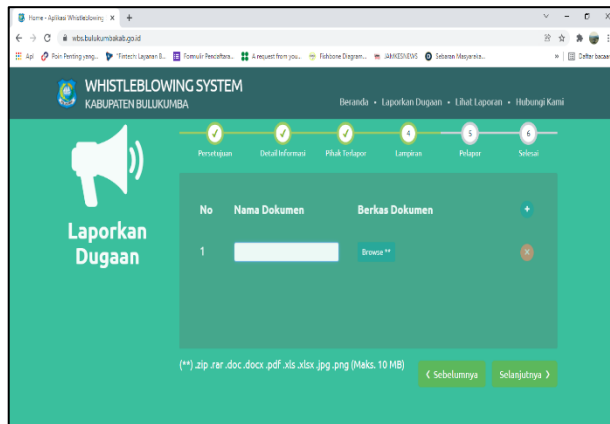
Fitur pertama adalah Laporkan Dugaan. Pertama, masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindakan pungli, korupsi, dan lainnya tinggal mengisi formulir mulai dari melakukan persetujuan sebagai *whistleblower*. Setelah melakukan klik terhadap persetujuan tersebut, lalu tinggal klik bagian buat laporan.



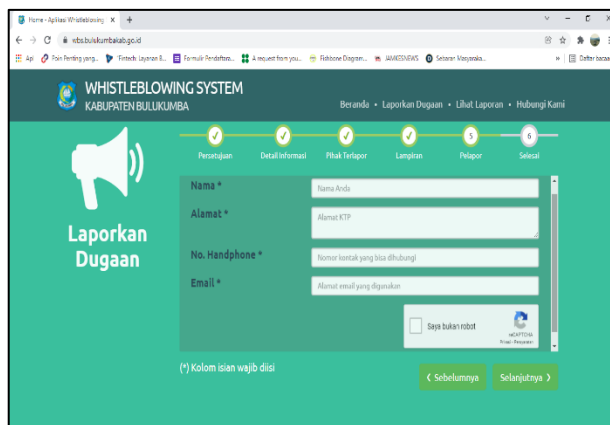
Kedua, mengisi Detail Informasi Kejadian, seperti topik laporan, tanggal kejadian, tempat kejadian, uraian kejadian, jumlah rupiah (jika ada laporan terkait korupsi/pungli), dan lainnya, kemudian, klik Selanjutnya.



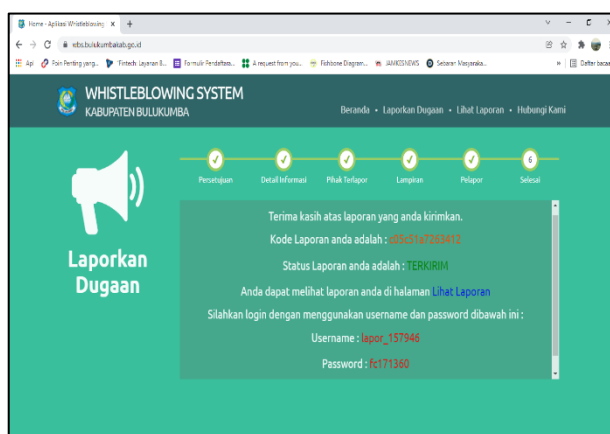
Ketiga, mengisi identitas dari pihak yang dilaporkan, seperti nama, unit kerja, NIP, dan jabatan, kemudian, klik Selanjutnya.



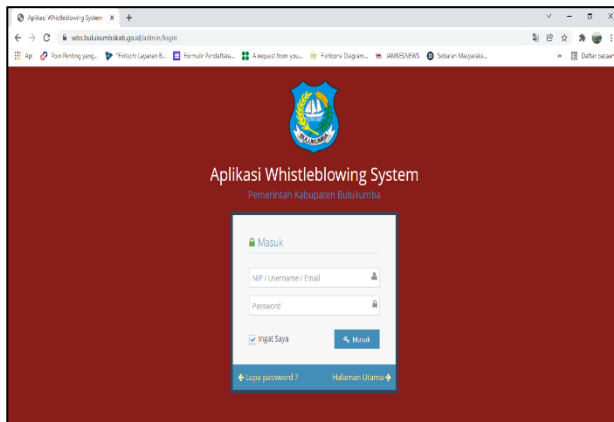
Keempat, memasukkan bukti pendukung, seperti dokumentasi, dan lainnya, kemudian, klik Selanjutnya.



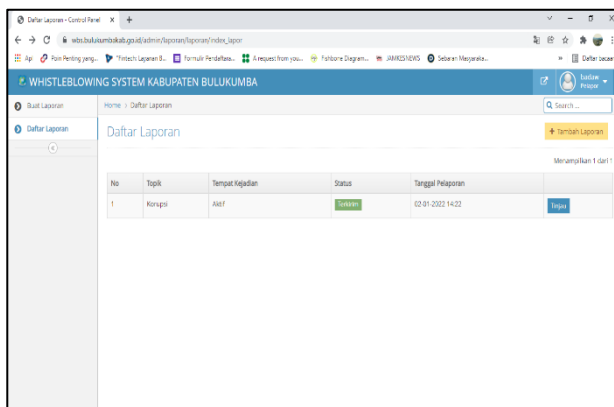
Kelima, mengisi identitas sebagai pelapor/*whistleblower*, seperti nama, alamat, nomor hp, dan email, kemudian, klik Selanjutnya.



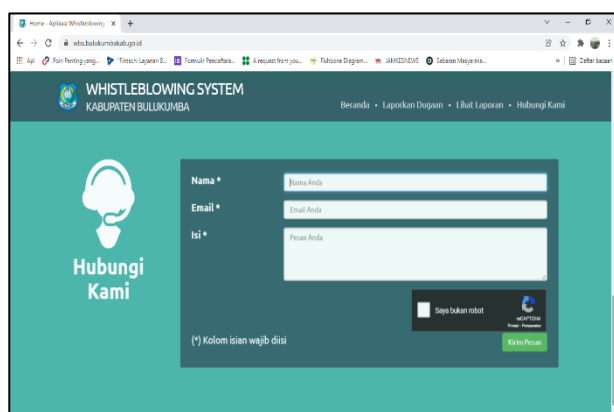
Terakhir akan muncul tampilan seperti gambar di samping, mulai dari status laporan yang telah terkirim dan akun laporan dengan *username* dan *password*. Selanjutnya, pengguna tinggal kembali ke fitur *home* dan klik Lihat Laporan.



Fitur kedua adalah Lihat Laporan. Fitur ini berfungsi untuk memantau tindak lanjut terkait dugaan tindakan yang dilaporkan. Pengguna tinggal memasukkan *username* dan *password* yang disediakan sebelumnya.



Pada fitur ini akan ditampilkan detail laporan jika laporan tersebut diterima untuk ditindaklanjuti ataupun laporan sedang diperiksa.



Fitur terakhir adalah Hubungi Kami yang berfungsi sebagai fitur bagi masyarakat atau pengguna yang kesulitan melakukan pelaporan.